

Volume 3 Nomer 2, Mei 2025

UPAYA PENINGKATAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN  
**Agus Junaidi.S , Uswatun Chasanah, Achmad Tjahjono**

EVALUASI KINERJA BAGIAN KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA BANTUL  
**Ahmad Rifqi, Wahyu Purwanto, Suhartono Suhartono**

EVALUASI KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
**Dwika Rastrasila, Meidi Syaflan, Sulastiningsih Sulastiningsih**

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN DI AKADEMI MILITER MAGELANG  
**Eka Wahyudianta, Nur Widiastuti**

PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, DISIPLIN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PERSONEL AKADEMI MILITER  
**Erwin Djatniko, Muhammad Awal Satrio Nugroho, Sofiati Sofiati**

UPAYA PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MR. DIY YOGYAKARTA  
**Jeffri Vover Situmeang, Muda Setia Hamid, Zulkifli Zulkifli**

ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KOROWELANG KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN  
**Muhamad Haryanto, Jazuli Akhmad**

UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) DI PUSKESMAS CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG  
**Rohedy Kartiko Junianto, Priyastiwati Priyastiwati, Muhammad Subkhan**

EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(Studi di SDN 1 Sadangkulon Kec. Sadang Kab. Kebumen Tahun 2020)  
**Sarip Hidayat, Mohamad Mahsun, Ary Sutrischastini**

ANALISIS KINERJA PERAWAT RUANG ISOLASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PADA PASIEN  
**Sarwidi Sarwidi, Suci Utami Wikaningtyas**

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DIMEDIASI DISIPLIN TARUNA AKMIL MAGELANG  
**Yulia Indriawati, Muhammad Mathori**

Home / Archives / Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia

## Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.32477/jrima.v3i2>

Published: 2025-05-08

### Articles

- UPAYA PENINGKATAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**  
Agus Junaidi.S , Uswatun Chasanah, Achmad Tjahjono 171 – 193  
[pdf](#)
- EVALUASI KINERJA BAGIAN KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA BANTUL**  
Ahmad Rifqi, Wahyu Purwanto, Suhartono Suhartono 194 - 210  
[pdf](#)
- EVALUASI KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN MAGELANG SELATAN**  
Dwika Rastrasila, Meidi Syaflan, Sulastiningsih Sulastiningsih 211 – 231  
[pdf](#)
- UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN DI AKADEMI MILITER MAGELANG**  
Eka Wahyudianta, Nur Widiastuti 232 – 252  
[pdf](#)
- PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, DISIPLIN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PERSONEL AKADEMI MILITER**  
Erwin Djatniko, Muhammad Awal Satrio Nugroho, Sofiaty Sofiaty 253 - 282  
[pdf](#)
- UPAYA PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MR. DIY YOGYAKARTA**  
Jeffri Vower Situmeang, Muda Setia Hamid, Zulkifii Zulkifii 283 - 301  
[pdf](#)
- ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KOROWELANG KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**  
Muhamad Haryanto, Jazuli Akhmad 302 - 314  
[pdf](#)
- UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) DI PUSKESMAS CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Rohedy Kartiko Juniarto, Priyastwi Priyastwi, Muhammad Subkhan 315 - 330  
[pdf](#)
- EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
(Studi di SDN 1 Sadangkulon Kec. Sadang Kab. Kebumen Tahun 2020)  
Sarip Hidayat, Mohamad Mahsun, Ary Sutrischastini 331 - 346  
[pdf](#)
- ANALISIS KINERJA PERAWAT RUANG ISOLASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PADA PASIEN**  
Sarwidi Sarwidi, Suci Utami Wikaningtyas 347 - 373  
[pdf](#)
- PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DIMEDIASI DISIPLIN TARUNA AKMIL MAGELANG**  
Yulia Indriawati, Muhammad Mathori 374 - 396  
[pdf](#)

### Make a Submission

### INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

### EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

### ARTICLE TEMPLATE



### ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



9 772986 467009

### TOOLS

zotero

Mendeley

### INDEXING LIST



### Support By



### VISITORS

00017613

## **UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PENGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN DI AKADEMI MILITER MAGELANG**

**Eka Wahyudiyanta (Akademi Militer)<sup>1</sup>  
Nur Widiastuti (STIE WW)<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*This research aims to describe personnel competency in administering state property (BMN) through the use of the Simak-BMN application at the Magelang Military Academy, to find out the causes of personnel competency in administering state property (BMN) through the use of the Simak-BMN application at the Magelang Military Academy. not yet optimal and to formulate efforts to increase personnel competency in administering state property (BMN) through the use of the Simak-BMN application at the Magelang Military Academy. The research design used is descriptive quantitative research supported by data obtained by observation, interviews and involvement with the research object. Data analysis uses the Miles & Hubberman qualitative analysis model. The results of the research show that personnel competency in administering state property (BMN) through the use of the Simak-BMN application at the Magelang Military Academy is still not optimal, due to limited understanding of the SIMAK BMN application, as well as limited human resources so they have to work simultaneously. Apart from that, they have different educational backgrounds in the technical field of Goods Administration. Efforts to increase personnel competency in administering state property (BMN) through the use of the Simak-BMN application at the Magelang Military Academy include competency development which can be carried out in the form of classical learning such as training, seminars, courses and upgrades as well as other activities carried out to maintain the level of expertise ( maintain rating) and non-classical learning is carried out, including through electronic learning programs (e-learning), guidance in the workplace, distance training, internships (on the job learning), as well as carrying out informal and formal coordination.*

*Keywords: Competence, Administration of State Property (BMN), Simak-BMN Application*

### **PENDAHULUAN**

Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pemindah tangan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK/2009 tentang Tata cara Pemusnahan dan penghapusan BMN. Sesuai dengan tujuan penatausahaan Barang Milik Negara yaitu mewujudkan tertib administrasi dan

mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, maka ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan (Permenkeu, 2016).

Laporan Barang Milik Negara dibuat berdasarkan data-data yang terdapat pada inventarisasi barang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi SAIBA merupakan satu kesatuan dan saling terkait, dimana data neraca berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang ada dilaporan keuangan pada aplikasi SAIBA merupakan data pengiriman dari aplikasi SIMAK-BMN secara periodik. Sehingga benar atau tidaknya data neraca pada laporan keuangan tergantung dari data yang diterima dari aplikasi SIMAK-BMN. Data transaksi Barang Milik Negara adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan Barang Milik Negara, yang dikirimkan melalui media Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja (Rahayu, 2014).

Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*) (Rahayu, 2014).

Hal ini mendorong para personel yang berwenang dalam penatausahaan Barang Milik Negara di Akademi Militer (Akmi) Magelang sejumlah 35 orang untuk meningkatkan kompetensi personal dalam melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar terwujud penatausahaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel. Kompetensi merupakan kemampuan dasar seseorang dalam hal pengetahuan, keterampilan, perilaku dan hal lain yang terkait dengan aturan yang dikeluarkan organisasi dan berdasar pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Indikator kompetensi antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Berdasarkan studi pendahuluan kompetensi personel dalam penerapannya, masih ditemukan kekurangan pada penatausahaan Barang Milik Negara yaitu:

1. Masih ada personel yang kurang memiliki kompetensi di bidang penatausahaan Barang Milik Negara menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Data Personel Yang Sudah Mengikuti Pelatihan/Bintek Penatausahaan**  
**Barang Milik Negara**

No	Pangkat		Pelatihan Pengadaan BMN		Bintek SIMAK-BMN	
			Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Perwira	7	5	2	5	2
2	Bintara	15	5	10	11	4
3	Tamtama	13	4	9	9	4
Jumlah		35				

Sumber: Data Sekunder, 2023

Dari data di atas diketahui bahwa masih ada beberapa personel yang belum mengikuti Pelatihan/Bintek Penatausahaan Barang Milik Negara Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

2. Banyaknya jumlah Barang Milik Negara juga menyebabkan beberapa penyimpangan yang terjadi sehingga dapat menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan Barang Milik Negara tersebut, sehingga sangat penting untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Masih ada beberapa Barang Milik Negara yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah serta ada pula Barang Milik Negara yang digunakan oleh pihak ketiga dan sebagainya. Hal ini membuat pengamanan Barang Milik Negara dari segi administratif, fisik dan hukum di Kementerian/Lembaga belum dilakukan secara baik sehingga Barang Milik Negara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan aset negara sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan pertama perwira di Akmil Magelang tidak hanya sekedar administratif semata, tetapi lebih untuk menangani aset negara, dengan cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, personel perlu memiliki kemampuan baik pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) dalam lingkup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Suryadin, Yusup, (2012), dalam penelitian yang berjudul Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Sebagai Bahan Penyusunan Neraca Pada Satker Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa SIMAK BMN memberikan manfaat yang besar bagi Satuan Kerja dalam pengelolaan BMN yang efektif dan efisien dan memudahkan penyusunan laporan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pengelolaan SIMAK BMN belum dilaksanakan secara optimal untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kantor belum dimanfaatkan secara maksimal, maka perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas operator

SIMAK BMN dengan cara peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil menurut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI, 2006) yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial dalam pengelolaan BMN serta penggunaan aplikasi SIMAK BMN. *Transfer of knowledge* juga penting dilakukan dari petugas yang lama kepada petugas yang baru apabila terjadi mutasi pegawai.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan mengingat pentingnya kompetensi personel dalam penatausahaan Barang Milik Negara di Akademi Militer Magelang menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) agar laporan yang dihasilkan dapat menggambarkan nilai aset yang sebenarnya serta laporan tersebut dapat diandalkan maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Kompetensi Personel Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang”

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang.
2. Untuk mengetahui penyebab kompetensi personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang belum optimal.
3. Untuk merumuskan upaya meningkatkan Kompetensi Personel Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kompetensi

Menurut David Mc. Clelland dalam Sedarmayanti, (2011) mengemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap kinerja, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.

Menurut Sutrisno, (2009) mengemukakan kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu.

Menurut Wibowo, (2009) kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Syahroni (2006) mengemukakan bahwa, kompetensi adalah sekumpulan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa

pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas jabatannya secara professional, efektif dan efisien.

### **Indikator Kompetensi**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, kompetensi Pegawai Negeri Sipil Penata Laksana Barang dapat diukur melalui 3 kompetensi yaitu:

- a. Kompetensi Teknis yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi.
- b. Kompetensi Manajerial yaitu kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kompetensi menerapkan konsep dan teknik perencanaan kerja, pengorganisasian (membentuk tim *work*), pengendalian (hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja unit organisasi).
- c. Kompetensi Sosial adalah kompetensi dalam melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

### **Pengertian Penatausahaan Barang Milik Negara**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara mendefinisikan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari peroleh lainnya yang sah. Barang yang dimaksud berupa barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang dimaksud dengan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksana penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang.

### **Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN)**

- a. Pengertian Aplikasi SIMAK-BMN

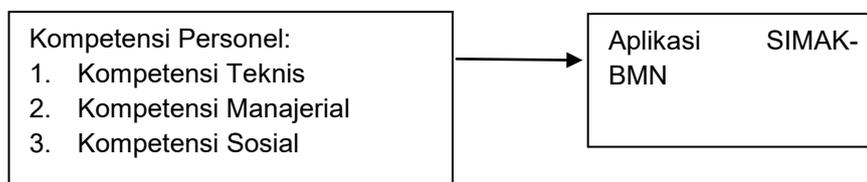
Dalam Aplikasi SIMAK-BMN, terdapat menu-menu yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi terkait barang yang meliputi Perolehan, Perubahan dan Penghapusan Aset Tetap. (Rahayu, 2014)

- b. Proses Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN

Prosedur awal jika aplikasi SIMAK-BMN telah di instal dalam komputer langkah awal untuk pengoperasian adalah log in terlebih dahulu, berikut ini adalah prosedurnya :

- 1) Klik *shourtcut* Aplikasi SIMAK-BMN yang ada di desktop.
- 2) Kemudian akan ditampilkan layar pembuka aplikasi administrator dalam SIMAK-BMN tingkat UAKPB
- 3) Untuk user yang baru pertama kali menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ketik “admin” di kotak username dan ketik “admin” di kotak password. Ketik “localhost” di kotak IP Server apabila database tidak dipisahkan dalam server tersendiri. Sementara apabila database diputuskan dalam satu sever maka IP Server diisi dengan kode server. Isi tahun anggaran sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Klik masuk untuk menggunakan menu administrator, yang selanjutnya akan muncul tampilan menu administrator.

## KERANGKA PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Penelitian  
Sumber: SANKRI, 2006

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sujarweni (2015), penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut pandang jenis dan analisis data, berdasarkan tujuannya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplanasi, dan pendekatannya.

### Subyek Dan Obyek Penelitian

#### 1. Subyek Penelitian

Menurut Arikunto (2017) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subyek penelitian

ini adalah 3 orang personel yang menangani Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah upaya meningkatkan Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang.

## Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti juga sudah harus melakukan analisis jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum jelas, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan baru lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) dengan tahapan pengumpulan data yaitu:

### 1. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)

*Data Collecting* yaitu tahap mengumpulkan data dengan cara mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data tidak hanya dilakukan sekali tapi dilakukan sehari-hari, bisa juga sampai berbulan-bulan menyesuaikan data yang ingin diperoleh. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua hal yang dilihat dan didengar direkam semua, dengan demikian peneliti akan mendapatkan data yang sangat banyak.

### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merupakan memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang penting. Didalam reduksi data ini, laporan-laporan lapangan disusun, dipilih hal-hal yang penting, diprioritaskan terhadap hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih kuat terhadap hasil penelitian di lapangan, dan juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya yaitu display data atau penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti juga tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh sebab itu agar melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan

membuat alat ukur seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

#### 4. Klasifikasi Data (*Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai upaya peningkatan Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang.

Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut, apabila ditinjau dari:

#### a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi, hal tersebut disampaikan narasumber salah seorang perwira Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer Magelang.

Disampaikan narasumber dalam wawancara Kompetensi manajerial yang dimiliki sudah baik dan didasarkan pada aturan yang berlaku terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi dan pelaporan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer.

Berikut ini adalah data rata-rata penilaian kompetensi 35 orang Personil Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer, yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, Kompetensi Manajerial bagi Personil Akmil Magelang dengan jabatan fungsional Penata Laksana Barang dengan interval kriteria penilaian:

91 – ke atas	: Sangat baik
76 – 90	: Baik
61 – 75	: Cukup
51 – 60	: Kurang

50 – ke bawah : Buruk  
dan data tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Kompetensi Manajerial bagi Personil Penata Laksana Barang Akmil Magelang**

Kompetensi Manajerial	Deskripsi	Rata-Rata
Integritas	Mampu mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik	82,29
Kerjasama	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	83,71
Komunikasi	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	81,43
Orientasi pada hasil	Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja	79,71
Pelayanan Publik	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan	82,86
Pengembangan diri dan orang lain	Pengembangan diri	80,00
Mengelola Perubahan	Mengikuti perubahan dengan arahan	82,29
Pengambilan Keputusan	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	82,00
Total		81,80

Sumber: Data Sekunder Akmil Magelang, 2023

Berdasarkan penilaian Kompetensi Manajerial Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang diketahui nilai rata-rata 81,80 (baik), namun masih ada kompetensi manajerial yang perlu diperbaiki lagi yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, Pengembangan diri.

Disampaikan narasumber di atas bahwa kompetensi manajerial yang diupayakan dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian), yang dikembangkan mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi dan pelaporan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Siklus Manajemen Fasilitas Pendidikan Di Akmil**  
**Sumber: Data Akmil Magelang, 2023**

Kegiatan Manajerial Personil Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Siklus Manajemen Fasilitas Pendidikan Di Akmil Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan fasilitas pendidikan di Akademi Militer disusun sebagai bagian dari perencanaan umum jangka sedang kurun waktu lima tahun dan jangka pendek kurun waktu satu tahun, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dirumuskan dalam rencana yang saling berkesinambungan, sehingga diperoleh berbagai rumusan dengan menentukan arah, tujuan, sasaran strategis dan program serta kegiatan.

Secara rinci perencanaan fasilitas pendidikan disusun dalam rencana pembangunan jangka pendek yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Akmil tahun 2023 yang merupakan perencanaan kegiatan program yang akan dilaksanakan pada TA 2023. Dalam membuat perencanaan, Akademi Militer berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengertian Rencana Kebutuhan BMN, yang selanjutnya disebut RKBMN, adalah rincian kebutuhan BMN pada masa yang akan datang yang disusun berdasarkan pengadaan barang yang telah lalu dan keadaan yang sedang berjalan. Di samping itu juga berpedoman pada Rencana Strategis Angkatan Darat, Program Kerja Akademi Militer tahun berjalan, Petunjuk Perencanaan Akademi Militer, dan Rencana Kerja Akademi Militer.

2) Pengadaan

Pengadaan BMN yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan berupa pengadaan fasilitas belajar dan mengajar, pengasuhan maupun latihan jasmani militer, pada dasarnya tidak berbeda dengan proses dan pelaksanaan pengadaan barang-barang lainnya, hanya saja di Akademi Militer sangat menekankan prinsip-prinsip dalam pengadaan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Yang dimaksud efisien adalah pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Akmil Magelang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud efektif adalah dengan sumber daya yang tersedia dapat memperoleh BMN yang mempunyai nilai manfaat setinggitingginya, yaitu kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan peralatan lainnya. Pengadaan BMN terutama sarana dan prasarana pendidikan di Akmil Magelang di Akademi Militer sangat diperlukan sesuai

dengan aturan yang berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang diperlukan.

### 3) Penggunaan

Dalam penggunaan fasilitas pendidikan terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Penggunaan senjata (misalkan senjata pistol) merupakan suatu kegiatan yang memerlukan ketelitian baik dalam penyelenggaraan secara fisik maupun dari segi administrasi, mengingat senjata tersebut merupakan barang yang diawasi dan barang berbahaya, maka dalam penggunaan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan personel yang terlibat, antara lain jajaran Peralatan Akmil sebagai pendukung penyiapan, pemeriksaan, dan perbaikan senjata, jajaran Departemen Militer Dasar sebagai pembina materi latihan menembak, dan pendukung latihan yang terdiri antara lain Bagian Pengamanan, Provost, Pembekalan Angkutan, Kesehatan, Dendemat, dan Perhubungan. Adapun pelaku adalah Taruna Akmil. Persyaratan administrasi dalam penggunaan senjata untuk latihan antara lain Naskah Rencana Lapangan Menembak Pistol yang di dalamnya mengatur secara rinci siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana sebuah latihan menembak diselenggarakan.

Rencana Lapangan ini juga harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran antara lain bagan struktur organisasi latihan, jadwal latihan, pembagian tugas pelatih, bagan daerah latihan, dan lain-lain. Kelengkapan administrasi berikutnya adalah Naskah Laporan Pelaksanaan Latihan Menembak Pistol yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang hasil latihan menembak pistol Taruna Akmil yang telah dilaksanakan, dengan tujuan sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan selanjutnya, khususnya dalam penyelenggaraan latihan menembak pistol.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penggunaan fasilitas pendidikan khususnya penggunaan senjata, harus dilakukan secara teliti, lengkap dan tertib administrasi, penuh kehati-hatian, serta antisipatif, untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, guna mencegah atau diminimalisasi jatuhnya korban.

### 4) Pemeliharaan

Proses dan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pendidikan berupa senjata, yang merupakan salah satu fasilitas pendidikan di Akademi Militer yang sifatnya khusus, maka pemeliharannya juga bersifat khusus. Kekhususan tersebut anantara lain dapat terlihat dalam pemeliharaan senjata diperlukan suatu organisasi khusus pemeliharaan, berbeda

dengan materiil lain misalkan kendaraan, tidak perlu dibentuk organisasi khusus. Dalam organisasi tersebut diuraikan tentang tugas dari setiap personel secara jelas, siapa berbuat apa. Di samping itu, untuk mengisi organisasi juga harus dipilih personel secara khusus pula, yaitu yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu yang layak dan sesuai dengan tugas pemeliharaan senjata.

Pemeliharaan senjata bukan hanya sekedar memelihara dalam arti sempit, tetapi lebih luas dari itu yaitu termasuk dalam kegiatan perbaikan. Dalam kegiatan pemeliharaan, manakala ditemukan kerusakan pada komponen atau bagian dari senjata, maka harus dilakukan perbaikan sehingga senjata dapat digunakan kembali dan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam pemeliharaan dan perbaikan senjata, dilakukan secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Juga dilakukan secara berjenjang manakala terjadi kerusakan dan memerlukan perbaikan, yaitu mulai dari tingkat Satuan, tingkat Daerah sampai dengan tingkat Pusat.

#### 5) Penghapusan

Dalam penghapusan, perlu mempertimbangkan dua hal yaitu pertimbangan teknis dan pertimbangan ekonomis. Pertimbangan teknis antara lain karena senjata sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi. Pertimbangan ekonomis antara lain, biaya pemeliharaan dan biaya operasional lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh.

BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dimohonkan oleh PB/KPB, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan, selanjutnya direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat kemudian diungkapkan dalam CaLBMN (Catatan atas Laporan Barang Milik Negara) dan CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Dalam penghapusan, perlu dibentuk organisasi khusus penghapusan yang didalamnya menguraikan tugas setiap personel yang terlibat dalam organisasi penghapusan. Organisasi penghapusan disusun mulai dari tingkat Satuan bawah sampai dengan tingkat Mabes TNI AD.

Pelaksanaan penghapusan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Penghapusan misalnya senjata tidak boleh dilakukan di tingkat Daerah, tetapi harus dilakukan di tingkat Pusat, dan pucuk pimpinan TNI AD yaitu Kasad, ikut terlibat dalam proses dan pelaksanaan penghapusan senjata.

Hal ini dimaksudkan antara lain agar penghapusan senjata sebagai barang berbahaya dan diawasi, dapat terlaksana dengan baik dan benar,

tidak terjadi penyimpangan, penggelapan, pencurian, penyalahgunaan, dan sangat mengutamakan faktor keamanan.

#### 6) Inventarisasi

Inventarisasi dan pelaporan fasilitas pendidikan dimana satuan bawah diberi tugas melakukan inventarisasi barang setiap bulan sebagai persiapan membuat pelaporan Simak BMN pada setiap semester.

Akmil Magelang melakukan inventarisasi:

##### a) 1 Tahun

melalui pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun, untuk BMN berupa persediaan dan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

##### b) 5 Tahun

melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun, untuk BMN selain persediaan dan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

#### 7) Pelaporan

Laporan Barang dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pelaporan Fasilitas Pendidikan di Akmil, tergabung dalam pelaporan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab Akmil secara keseluruhan, tidak dikhususkan dalam pelaporan Fasilitas Pendidikan saja, dengan demikian yang menjadi dasar pelaporan fasilitas pendidikan adalah sama dengan dasar atau landasan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Dasar tersebut adalah:

- (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
- (2) Perkasad Nomor /49- 02/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Angkatan Darat,
- (3) Surat Menhan RI NO B/781/04/07/02/ Djkuat tanggal Mei 2013 tentang Penetapan Aplikasi Simak BMN Kemkeu, dan ST Kasad Nomor: ST/1438/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Aplikasi Simak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada tahap persiapan pelaporan fasilitas pendidikan di Akmil, yaitu pada kegiatan pemberian informasi kepada Satuan bawah agar membuat laporan BMN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan periode

waktu yang telah ditentukan, secara otomatis Satuan bawah melaksanakan kegiatan inventarisasi terhadap BMN yang menjadi tanggung jawabnya. Satuan bawah tidak bisa melakukan pelaporan BMN dengan benar tanpa didahului dengan inventarisasi. Sehingga dalam pelaporan BMN Akmil secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat fasilitas pendidikan, secara otomatis telah dilakukan kegiatan inventarisasi terhadap fasilitas pendidikan.

#### b. Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk TNI dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Kompetensi Teknis personil TNI dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Akmil Magelang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

Berikut ini adalah data rata-rata penilaian kompetensi 35 orang Personil Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer, yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, Kompetensi Teknis bagi Personil Akmil Magelang dengan jabatan fungsional Penata Laksana Barang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Kompetensi Teknis bagi Personil Penata Laksana Barang Akmil Magelang**

Kompetensi Teknis	Deskripsi	Nilai Rata-Rata
Penyusunan Perencanaan Kekayaan Negara di Akmil Magelang	Mampu menyiapkan bahan untuk perencanaan kekayaan negara di Akmil Magelang	83,14
Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Kekayaan Negara di Akmil Magelang	Mampu memberikan konsep rekomendasi terhadap penggunaan pengamanan dan pemeliharaan fisik kekayaan negara di Akmil Magelang	79,71
Penatausahaan Kekayaan Negara di Akmil Magelang	Mampu melaksanakan penatausahaan kekayaan negara di Akmil Magelang	83,71
Pemanfaatan Kekayaan Negara di Akmil Magelang	Mampu melakukan analisis alternatif pemanfaatan kekayaan negara di Akmil Magelang	81,14
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Kekayaan Negara di Akmil Magelang	Mampu melakukan analisis data terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan	82,29

Kompetensi Teknis	Deskripsi	Nilai Rata-Rata
	kekayaan negara di Akmil Magelang	
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara di Akmil Magelang	Menyiapkan bahan referensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kekayaan negara di Akmil Magelang	82,86
Total		82,14

Sumber: Data Sekunder Akmil Magelang, 2023

Berdasarkan penilaian Kompetensi Teknis Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang diketahui nilai rata-rata 82.14 (baik), namun masih ada kompetensi teknis yang perlu diperbaiki lagi yaitu penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan kekayaan negara di Akmil Magelang.

Salah satu bentuk kompetensi teknis yang harus dipahami personil TNI Akmil Magelang adalah pemahaman tentang SIMAK-BMN Akmil Magelang, berikut ini dikemukakan konsep-konsep dasarnya:

1) Pembukuan

Pelaksana penatausahaan pembukuan BMN melakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan pengkodefikasi barang, dengan jenis kegiatannya adalah penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN dan penghapusan BMN.

2) Kodifikasi BMN

Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN di Akmil Magelang diberikan kode dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara bertujuan untuk terciptanya keseragaman dalam penggolongan dan klasifikasi Barang Milik Negara secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara di Akmil Magelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Negara membagi BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub kelompok.

Golongan BMN meliputi: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud. Dari masing-masing Golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang,

kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan demikian, klasifikasi paling rinci (detil) ada dilevel Sub-sub kelompok. Dalam hal ada BMN belum ada kodifikasinya maka Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan selaku Pengguna Barang dapat mengusulkan kode BMN kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya akan dilakukan kajian bersama.

### 3) Labelisasi/RegistrasiBMN

Untuk memudahkan pencatatandan pengendalian,BMN selain diberikan identifikasi berupa kode BMN/kode barang, kode organisasi yang mempunyai BMN tersebut, sertatahun perolehan BMN tersebut. Pemberian kode BMN sepenuhnya mengacu kepada PMK Nomor 29/PMK.06/2010.

### c. Kemampuan Sosial Kultural

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Berikut ini adalah data rata-rata penilaian kompetensi 35 orang Personil Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer, yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang,Kompetensi Sosial bagi Personil Akmil Magelang dengan jabatan fungsional Penata Laksana Barang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Kompetensi Sosial bagi Personil Penata Laksana Barang Akmil Magelang**

Kompetensi Sosial	Deskripsi	Rata-Rata
Perekat Bangsa	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	84,86

Sumber: Data sekunder Akmil Magelang, 2023

Berdasarkan penilaian Kompetensi Sosial Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang diketahui nilai rata-rata 84,86(baik).

Disampaikan narasumber sebagai personil dengan profesi prajurit TNT yang melaksanakan penugasan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum, kode etik tenaga profesi, norma agama dan norma sosial. TNI hendaknya menyesuaikan diri dalam

melaksanakan tugas-tugasnya sehingga tidak hanya fokus pada perang secara nyata semata. Dalam Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan ada 14 operasi militer selain perang yang perlu dijalankan oleh TNI di antaranya, membantu tugas pemerintah daerah, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta (Sishanta).

Disampaikan ketrampilan sosial kultural diwujudkan dalam kemampuan beradaptasi dalam team kerja Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang, apabila ada kendala, masalah dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama dengan kompak, kemudian jiwa sosial juga diwujudkan dalam kepekaan terhadap lingkungan di luar Akmil Magelang seperti menerima kunjungan studi banding, membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan bencana (*search and rescue*), mengatasi terorisme dan sebagainya.

## **2. Kompetensi Personel Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang masih belum optimal**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Kompetensi Personel Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang masih belum optimal, karena:

- a. Keterbatasan pemahaman mengenai aplikasi SIMAK BMN
- b. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga harus merangkap pekerjaan. Selain itu *background* pendidikan yang berbeda di bidang teknis Penatausahaan Barang.

## **3. Upaya meningkatkan Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang**

Berdasarkan hasil wawancara upaya meningkatkan Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang adalah dengan:

- a. Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - 1) pembelajaran klasikal seperti pelatihan, seminar, kursus dan penataran serta kegiatan lain yang dilakukan untuk mempertahankan tingkat keahlian (*maintain rating*).
  - 2) pembelajaran nonklasikal dilakukan diantaranya melalui program pembelajaran elektronik (*e-learning*), bimbingan di tempat kerja, Pelatihan jarak jauh, magang (*on the job learning*); dan/atau pertukaran PNS/TNI dengan pegawai swasta.

b. Melaksanakan koordinasi informal dan formal.

Koordinasi ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia sehingga dapat berkoordinasi untuk menjalankan tugas dalam tim, yang ada *background* pendidikan yang berbeda di bidang teknis Penatausahaan Barang membimbing yang belum memiliki kompetensi Penatausahaan Barang.

Koordinasi informal ialah koordinasi yang dilakukan setiap harinya ketika jam kerja antar pegawai perlengkapan, persediaan dan inventaris. Koordinasi formal ialah koordinasi yang dilakukan antar petugas BMN yang dilaksanakan paling tidak dua bulan sekali.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut, apabila ditinjau dari
  - (1) Kompetensi Manajerial diwujudkan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi dan pelaporan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Akademi Militer, namun masih ada kompetensi manajerial yang perlu diperbaiki lagi yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, Pengembangan diri;
  - (2) Kompetensi Teknis dilaksanakan dalam kegiatan pemahaman tentang SIMAK-BMN Akmil Magelang, dengan konsep-konsep dasar pembukuan, pengkodean, Labelisasi/Registrasi BMN, namun masih ada kompetensi teknis yang perlu diperbaiki lagi yaitu penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan kekayaan negara di Akmil Magelang;
  - (3) Kompetensi Sosial Kultural diwujudkan dalam kemampuan beradaptasi dalam team kerja Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang, apabila ada kendala, masalah dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama dengan kompak, kemudian jiwa sosial juga diwujudkan dalam kepekaan terhadap lingkungan di luar Akmil Magelang seperti membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan bencana (*search and rescue*), mengatasi terorisme dan sebagainya.
2. Kompetensi Personel Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang masih belum optimal, karena keterbatasan pemahaman mengenai aplikasi SIMAK BMN, serta

keterbatasan sumber daya manusia sehingga harus merangkap pekerjaan. Selain itu *background* pendidikan yang berbeda di bidang teknis Penatausahaan Barang.

3. Upaya meningkatkan Kompetensi Personel dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang adalah dengan Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klasikal seperti pelatihan, seminar, kursus dan penataran serta kegiatan lain yang dilakukan untuk mempertahankan tingkat keahlian (*maintain rating*) dan pembelajaran nonklasikal dilakukan diantaranya melalui program pembelajaran elektronik (*e-learning*), bimbingan di tempat kerja, Pelatihan jarak jauh, magang (*on the job learning*), serta melaksanakan koordinasi informal dan formal.

## SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya terus dilakukan pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klasikal seperti pelatihan, seminar, kursus dan penataran serta kegiatan lain yang dilakukan untuk mempertahankan tingkat keahlian (*maintain rating*) dan pembelajaran nonklasikal dilakukan diantaranya melalui program pembelajaran elektronik (*e-learning*), bimbingan di tempat kerja, Pelatihan jarak jauh, magang (*on the job learning*),
2. Sebaiknya terus melaksanakan koordinasi informal dan formal dalam dalam Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang.
3. Sebaiknya terus ditingkatkan kemampuan beradaptasi dalam team kerja Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) melalui penggunaan Aplikasi Simak-BMN di Akademi Militer Magelang dengan kompak, kemudian jiwa sosial juga diwujudkan dalam kepekaan terhadap lingkungan di luar Akmil Magelang sepertimembantu menanggulangi bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan bencana (*search and rescue*), mengatasi terorisme dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., (2017),Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Babinkum TNI. (2013), Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Departemen Pertahan RI, (2009), Petunjuk Operasional Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Jakarta.
- Edy Nasrudin (2013),mengevaluasi Peningkatan kemampuan petugas dalam efektivitas SIMAKBMN di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Jember: Unmuh

- Hutapea, Parulin, MBA dan Thoha, Dr. Nuriana, MBA. (2008), *Kompetensi Plus*, Jakarta: PT. Gramedia
- Kuncoro, Mudrajad, (2013), *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- I Ketut Yadnyana, Ni Putu Ayu Ista Satiari (2020), *Karakteristik Sumber Daya Manusia Pada Efektivitas SIMAK BMN*, Denpasar: Universitas Udayana
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) / Barang Milik Daerah (BMD)
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK/2009 tentang Tata cara Pemusnahan dan penghapusan BMN
- Peraturan Menteri Pertahanan No 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan Barang Milik Negara Dilingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan No 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dilingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan No.78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementerian/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
- Rahardiyanti, A., Abdurachman, E (2012) Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam meningkatkan efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) terhadap pengelolaan asset negara, Jakarta: STIEI
- Rahayu, Nuraini, (2014), Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Manado, <https://media.neliti.com/media/publications/1993>, tanggal akses 4 Mei 2022
- Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), (2006), Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Sedarmayanti, (2011), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen. Pegawai Negeri Sipil*, Bandung : Rafika Aditama
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung:Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna., (2015), *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryadin, Yusup, (2012), *Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Sebagai Bahan Penyusunan Neraca Pada Satker Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*
- Sutrisno, Edi, (2009), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syahroni, Barkah, (2006), Analisis Jabatan Hubungannya dengan Standar Kompetensi Jabatan, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Wibowo, (2009), Manajemen Kinerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wijaya, H., Nadirsyah dan Darwanis (2013), Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap aplikasi SIMAK-BMN pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh, Banda Aceh: USK

[Home](#) / [Editorial Team](#)

## Editorial Team

### Editor in Chief:

**Suci Utami Wikaningtyas**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

### Editorial Board:

**Insiatiningsih** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

**Dr. Muhammad Mathori, S.E., M.Si**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

**Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

**Zulkifli, S.E., M.M.**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

**Insiatiningsih, S.E., M.M.**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

**Prof Dr. Eko Handayanto, Drs., M.M.**

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

### Publication and Content Editor:

Siti Khotimah, S.E.

### Make a Submission

### INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

### EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

### ARTICLE TEMPLATE



### ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



### TOOLS

[zotero](#)

[Mendeley](#)

### INDEXING LIST



### Support By

**iji** RELAWAN  
JURNAL INDONESIA

### VISITORS

00017614